



► PILKADA 2024

Aksi Kolektif Dorong Pemenuhan Hak Difabel

TEGALREJO—Puluhan organisasi masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan bersama terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Pernyataan tersebut menyoroti sejumlah poin dalam pesta demokrasi pada 27 November 2024.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Aksi kolektif ini diprakarsai oleh sejumlah organisasi difabel dan masyarakat sipil di Jogja, seperti Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia, Pusat Rehabilitasi Yakkum, Formasi Disabilitas

- Temuan dalam pemantauan Pemilu 2024 di sejumlah wilayah di Indonesia menjadi catatan merah bagi penyelenggara pemilu
- Surat suara dijadwalkan tiba di Gudang KPU Kota Jogja pada Rabu (16/10).

dan Yayasan LKIS. Dalam webinar bertajuk *Pilkada 2024: Bagaimana Partisipasi Difabel dan Peran Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif*, yang digelar akhir pekan kemarin, mereka menegaskan meski ada berbagai aturan yang memberikan

jaminan pemenuhan hak politik difabel, hak memilih dan dipilih difabel masih sering terlanggar.



Eksekutif Nasional Formasi Disabilitas, Nur Syarif Ramadhan, menjelaskan rendahnya jumlah pemilih difabel yang terdaftar, hambatan bagi difabel psikososial yang tinggal di panti rehabilitasi untuk menggunakan hak pilih dan menyalurkan suara, hingga berbagai hambatan dalam pelaksanaan pencoblosan adalah sebagian dari temuan dalam Pemilu 2024. "Hal ini penting

menjadi perhatian dalam perbaikan penyelenggaraan dalam pilkada yang tinggal menghitung hari," ujarnya, Sabtu (12/10).

Syarif menjelaskan temuan dalam pemantauan Pemilu 2024 di sejumlah wilayah di Indonesia menjadi catatan merah bagi penyelenggara pemilu, mulai dari pendataan pantarlih, tidak tercatatnya difabel sebagai pemilih difabel berpengaruh terhadap akomodasi pemilih difabel. Kemudian, masih terdapat bilik suara yang tidak aksesibel di 33 TPS dan sulit dijangkau pemilih difabel. "Masih banyak temuan lainnya. Bahkan, diperkirakan ada lebih dari satu juta difabel tidak tercatat sebagai pemilih difabel," katanya.

Wakil Direktur Sigab Indonesia, Muhammad Syamsudin, menegaskan pernyataan bersama ini merupakan aspirasi yang harus direspons oleh penyelenggara pemilu, termasuk oleh para kandidat yang berlaga di Pilkada 2024. "Pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan semestinya dimulai dari bagaimana elemen yang ada di dalam penyelenggaraan Pemilu mengakomodasi aspirasi," katanya.

Surat Suara

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara, KPU Kota Jogja memperkirakan surat suara tiba di Gudang KPU Kota Jogja pada Rabu (16/10). Ketua KPU Kota Jogja, Noor Harsya Aryosamodro, menjelaskan surat suara dikirim

dari percetakan CV Arya Duta Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Selasa [15/10].

Pengiriman tersebut diperkirakan memerlukan waktu satu hari, dan dijadwalkan tiba di Gudang KPU Kota Jogja di Jalan Pramuka, Prenggan, Kotagede, pada Rabu. Surat suara tersebut berjumlah 330.931 lembar dan pengirimannya bekerja sama dengan aparat kepolisian. Selain surat suara, KPU Kota Jogja juga akan menerima beberapa logistik lainnya. "Tahap kedua ada sampul kertas kubus, sampul formulir model C hasil, formulir model C salinan dan daftar pasangan calon. Untuk pengadaan logistik tahap kedua saat ini masih dalam proses lelang," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005